

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul meliputi (1) Fasilitas fisik yang terdiri dari *early warning system* (sistem peringatan dini), *handy talky*, jalan evakuasi, barak pengungsian, pemasangan internet di kawasan rawan bencana dan penataan kawasan permukiman serta (2) kegiatan non fisik yang terdiri dari pengawasan, peningkatan kapasitas masyarakat, gladi lapang, penyusunan dokumen manajemen kebencanaan, fasilitasi *community emergency respon* (CER), rencana kontijensi dan forum pengurangan risiko bencana. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problem kebencanaan adalah dengan merekonstruksi paradigma penanggulangan bencana. Bencana haruslah dipandang sebagai bukan urusan pemerintah semata tetapi juga harus menjadi urusan bersama.
2. Hambatan terkait Perananan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul antara lain kendala teknis, kendala sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan, kendala rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana, dispersepsi masyarakat, cuaca yang ekstrim,

kurangnya respons dari pengurus desa, dan kendala rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menjalankan fungsi sebagai motivator yang mendorong masyarakat kabupaten Bantul terutama masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta memaksimalkan peran Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberi pembinaan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengurangan risiko bencana.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu meningkatkan program pascabencana yang perlu dilakukan oleh tagana secara berkelanjutan serta perlu adanya program-program yang kreatif dan inovatif dalam penanggulangan bencana serta pemerintah daerah atau bupati sebaiknya mengoptimalkan perda tentang tata kerja organisasi BPBD agar tidak terlalu fokus pada keputusan pemerintah pusat mengingat setiap daerah berbeda kondisi dan potensi bahaya bencana alam yang bisa terjadi;
2. Sebaiknya pemerintah segera mencari solusi bagi masyarakat yang sering melakukan penambangan dan penebangan pohon sebelum terjadi penebangan yang meluas sekitar desa yang dapat berdampak bagi masyarakat di Kecamatan Imogiri.
3. Diharapkan Pemerintah (BPBD) berperan aktif dalam upaya mitigasi bencana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak

mengenai pencegahan dalam pengurangan resiko bencana apabila terjadi banjir.

4. Pada tingkat desa atau dusun melaksanakan pelatihan kebencanaan secara berkala dan berkelanjutan serta mengaktifkan kembali peran, tugas dan fungsi komunitas kebencanaan baik di tingkat Kecamatan, Desa maupun Dusun yang berada diwilayah Kecamatan Imogiri